

Date Received : 18 Juli 2024
Date Accepted : 15 September 2024
Date Published : 15 Oktober 2024

■ Multikulturalisme, Narasi Islamisme, dan Tantangan Pendidikan di Era Global

Muhammad Afifulloh

Universitas Islam Malang, Indonesia

Muhammad Fahmi Hidayatullah

Universitas Islam Malang, Indonesia

m.fahmihidayatullah@unisma.ac.id

Kata Kunci:

Multikulturalisme,
islamisme, globalisasi

ABSTRACT

Kondisi masyarakat majemuk di tengah kondisi global memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan kesempatan dan hak yang sama seperti mendapatkan pendidikan, tempat tinggal, dan kehidupan layak dengan kompetisi yang dilakukan sehari-hari tanpa disadarinya. Namun multikulturalisme memberikan dampak negatif bagi mereka yang kehilangan peluang dalam hidupnya hingga pada akhirnya membangun narasi negatif melalui sekte atau kelompok yang dibentuk dengan mengatasnamakan identitas agama mayoritas. Kondisi inilah yang menjadikan negara waspada terhadap narasi Islamisme atas dasar kepentingan kelompok dan berdampak pada gerakan ekstrimisme. Kondisi global menjadikan semua orang memiliki kesempatan dalam melakukan edukasi melalui apapun dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui penelitian ini, akan dijabarkan konsep multikulturalisme yang selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan mewaspada narasi Islamisme di tengah kondisi Global. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi kasus.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia digambarkan sebagai masyarakat yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku, bangsa, budaya dan agama. Kemajemukan ini biasa dikenal dengan “plural society”, di mana beberapa juga menyebutnya sebagai “dual society” (Nasikun, 1989:31). Terdapat dua faktor yang menyebabkan adanya keberagaman tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal yang berasal dari letak geografis Indonesia menjadi faktor utama adanya keberagaman tersebut. Hal ini dapat dilihat dari wilayah Indonesia yang melintang dari sabang hingga merauke kurang lebih sepanjang 3000 mil dan terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan oleh perairan. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari letak Indonesia yang berada diantara Samudra Hindia dan Pasifik, hal ini sangat berpengaruh terhadap keragaman agama pada masyarakat Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha merupakan agama yang pertama kali masuk pada masyarakat Indonesia kurang lebih pada abad ke-4 masehi. Kemudian disusul oleh agama-agama lain seperti Kristen dan Islam, agama-agama ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia (Ichtianto, 2005: 47-48).

Multikultural masyarakat Indonesia menjadi salah satu yang terbesar didunia, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya baik dari aspek geografis maupun sosio-kultural yang beragam. Letak wilayah Indonesia terdiri dari 13.000 pulau dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, dan memiliki 300 suku serta memiliki hampir 200 bahasa. Agama yang dianut masyarakat Indonesia juga beragam, terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia diantaranya agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (Diknas : 2004).

Namun keberagaman yang ada dapat memunculkan permasalahan bagi bangsa Indonesia, diantaranya kasus konflik antaragama, perseteruan politik, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa peduli untuk menghargai hak yang dimiliki orang lain. Contoh permasalahan ini timbul dari multikulturalisme yang ada di Indonesia. Sebagai kasus nyata, tragedi yang terjadi pada tahun 1965 yaitu pembantaian massal terhadap pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI), pada bulan Mei 1998 terjadi kekerasan etnis Tionghoa di Jakarta dan pada tahun 1998-2003 terjadi konflik antar agama Islam dan Kristen di Maluku.

Ada 2 demonstrasi besar yang pernah terjadi di Indonesia yang dikenal dengan nama “Aksi Damai 411” dan “Aksi Damai 212”. Berbagai elemen masyarakat dari berbagai daerah turut ikut serta dalam 2 demonstrasi besar ini. Imam Besar FPI (Front Pembela Islam) yaitu Habib Rizieq menjadi pelopor dan memimpin jalannya demonstrasi ini, hampir semua organisasi Islam yang ada di Indonesia baik individu maupun secara berkelompok turut ikut serta dan mendukungnya. Adapun tujuan diadakan demonstrasi ini adalah menuntut pemerintah untuk segera menghukum Basuki Tjahaja Purnama yang diduga telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Aksi Damai ini juga dapat dilihat dari perspektif budaya populer. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Aksi Damai ini lebih banyak diikuti oleh kelompok muslim perkotaan.

Narasi-narasi islamisme yang menunjukkan bahwa terdapat konflik yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, telah banyak beredar di media massa. Narasi ini merupakan sebuah langkah awal proses ideologisasi kelompok-kelompok islamis. Dalam rangka mengetahui narasi-narasi islamis tersebut, isu-isu yang berkaitan dan menjadi pokok utama dalam gerakan ini perlu diidentifikasi, serta bagaimana narasi ini

beroperasi dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia (Maarif, 2016:188).

Hal ini tidak terlepas karena adanya penetrasi globalisasi yang telah menjalar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Isu multikulturalisme dan islamisme tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, karena globalisasi merupakan sebuah proses integrasi untuk mengaburkan batas negara, ekonomi, budaya bahkan pemerintahan, sehingga terciptanya sebuah ketergantungan yang kompleks. Dapat disimpulkan, bahwa globalisasi dapat memperlebar koneksi dan memperlancar aliran modal, orang, barang dan pemikiran yang melintasi batas-batas negara (Noris, 2000: 155). Kemudahan akses sehingga menimbulkan ketergantungan yang disediakan oleh Globalisasi memberikan peluang bagi perkembangan multikulturalisme dan Islamisme diberbagai negara. Akan tetapi perkembangan yang terjadi tidak sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kedua fenomena tersebut, sehingga memberikan peluang terjadinya konflik, seperti ketegangan dan segregasi antar kelompok masyarakat atas dasar stereotip atau prasangka terhadap kelompok masyarakat tertentu (Allport, 1954).

Pemikiran stereotip bahkan prasangka yang terbentuk dari globalisasi dapat membangun keadaan yang menyerupai perang dingin yang tidak terlihat namun dengan suhu panas yang terus meningkat. Hal ini terjadi disebabkan adanya faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, ketegangan politik, trauma sejarah bahkan ketidakpastian terhadap hukum. Apabila keadaan perang dingin ini terus meningkat, maka akan terjadi konflik terbuka bahkan kekerasan yang timbul akibat ketidaksepahaman terkait konsep negara (multikulturalisme) dan agama (islamisme). Dari penjelasan diatas, melalui artikel ini penulis bertujuan untuk menjelaskan peluang dan tantangan yang timbul dari globalisasi dengan menjadikan konsep multikulturalisme sebagai landasan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memandang Islamisme sebagai paham yang tidak mengganggu kondisi masyarakat yang beragama dan menggambarkan agama Islam sebagai agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang sesama manusia maupun alam semesta (*Rahmatan lil Alamin*).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Multikultural

Multikulturalisme secara bahasa berasal dari “multi” yang bermakna banyak atau lebih dari satu dan “kultural” yang berarti tentang budaya. Secara sederhana, multikulturalisme merupakan sebuah pandangan yang mengakui keberagaman kultural (budaya) yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari keragaman yang bersifat tradisional seperti suku, ras maupun budaya yang ada di dalam kelompok masyarakat. Masyarakat Indonesia secara umum, dapat menerima adanya istilah multikulturalisme ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta mengenai keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Fakta-fakta yang terlihat, sebagai berikut : Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 13.667 pulau besar dan kecil, diikuti dengan keberagaman suku bangsa yang terbagi menjadi 358 suku dan 200 subsuku bangsa, serta menganut beragam kepercayaan.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri data tahun 2022, mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dengan jumlah 241,7 juta jiwa setara dengan 87,02% dari populasi di dalam negeri. Kemudian disusul agama lainnya dengan Kristen (7,43%), Katolik (3,06%), Hindu (1,69%), Budha (0,73%) dan Konghucu (0,03%). Sementara, ada

117.412 jiwa atau 0,04% penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan. Selain itu, sejarah budaya Indonesia mencerminkan percampuran berbagai pengaruh budaya, termasuk budaya asli Nusantara dengan agama Islam, Hindu dan pengaruh budaya Barat modern.

Multikulturalisme dikenal khalayak masyarakat sebagai sebuah keadaan yang menggambarkan multikultural realitas yang terjadi di tengah masyarakat (Heywood, 2007). Multikulturalisme sendiri dibagi menjadi lima model yaitu :

1. Isolasionis. Multikulturalisme jenis ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, namun kehidupan masyarakatnya dijalani secara otonom (berdiri-sendiri) dan interaksi yang terjadi sangatlah minim antara satu dengan yang lain. Contohnya adalah kehidupan masyarakat Samin, dimana mereka menerima keragaman budaya yang ada namun tetap hidup dan mempertahankan budaya kelompok mereka.
2. Akomodatif. Multikulturalisme ini memiliki suatu kelompok masyarakat yang dominan (mayoritas), kemudian kelompok ini membuat adanya penyesuaian serta akomodasi untuk kebutuhan masyarakat yang lebih sedikit (minoritas). Namun adanya kelompok mayoritas tidak mewajibkan kelompok minoritas harus patuh terhadap aturan kelompok mayoritas. Contohnya adalah keragaman agama di Indonesia, agama Islam sebagai agama mayoritas memiliki beberapa aturan yang menjadi umum namun agama lain tidak perlu patuh dan mengikuti ajaran agama Islam.
3. Otonomis. Multikulturalisme jenis ini memiliki pandangan tentang masyarakat kultural dimana kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Contohnya adalah masyarakat Indonesia bagian Timur menuntut hak kesejahteraan hidup, seperti fasilitas jalan dan harga bahan pokok.
4. Kritis/interaktif. Multikulturalisme jenis ini memiliki pandangan pada masyarakat plural dimana kelompok kultural tidak terfokus dengan kehidupan kultural otonom, akan tetapi lebih berkontribusi penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menguatkan perspektif-perspektif khas mereka.
5. Kosmopolitan. Multikulturalisme jenis ini menggambarkan masyarakat plural yang berupaya menghapus batas-batas kultural secara keseluruhan untuk menciptakan masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dengan budaya tertentu, akan tetapi secara bebas terlibat dalam percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Selain itu terdapat pula multikulturalisme normatif, dimana terdapat dukungan yang baik dan positif terhadap acara bahkan perayaan keragaman komunal. Multikulturalisme jenis ini didasarkan pada pengakuan terhadap hak-hak dari suatu kelompok yang berbeda agar dapat diharai dan diakui, sehingga dapat merasakan manfaat dari keragaman moral dan budaya dalam masyarakat yang lebih luas (Heywood, 2007: 313). Kebijakan yang dilibatkan dalam multikulturalisme ini bersifat terarah, sadar dan terencana yang disusun oleh pemerintah dan elemen masyarakat demi keadilan bersama.

Terdapat tiga pokok komponen yang ada dalam multikulturalisme, diantaranya ialah kebudayaan, pluralitas kebudayaan serta cara khusus dalam merespon pluralitas

itu (Parekh, 2001). Multikulturalisme merupakan perspektif atau cara pandang kehidupan manusia, bukan hanya sekedar politik pragmatik. Karena hampir semua negara di dunia terdiri dari beragam kebudayaan.

Dalam mengatasi realitas pluralitas kebudayaan, terdapat 3 model kebijakan yang dapat digunakan. Pertama, Nasionalitas. Sebuah model yang mengedepankan nasionalitas dipandang sebagai sebuah strategi baru yang dibangun bersama, tanpa memperhatikan perbedaan agama, suku, bangsa, ataupun bahasa dan nasionalitas bertujuan untuk memperkuat integrasi. Dalam kebijakan nasionalitas, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh negara. Namun, model ini sering dipandang sebagai perusak akar buaya etnis disebabkan yang menjadi dasar pembentukan negara dianggap sesuatu yang usang. Model kebijakan ini dikhawatirkan dapat berujung pada kekuasaan otoriter, karena keputusan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional dipegang oleh kelompok elite tertentu.

Kedua, model nasionalitas etnik. Model ini bergantung terhadap kesadaran kolektif etnik yang kuat, hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri (founders) menjadi dasar utama serta persatuan bahasa menjadi ciri khas dalam model nasional-etnik ini. Orang yang tidak memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan pendiri dianggap sebagai orang asing, sehingga model ini dianggap sebagai model yang tertutup.

Ketiga, model multikultural-etnik. Model ini mengakui eksistensi serta hak-hak masyarakat etnik secara kolektif, keanekaragaman diakui sebagai realitas yang harus diakomodasi negara, serta identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Penerapan kebijakan ini memunculkan isu-isu keanekaragaman kolektif dan etnik, serta isu hubungan antara kaum mayoritas dan minoritas, dominan dan tidak dominan. Dari berbagai kasus yang ada kaum mayoritas tidak selalu dominan, bahkan disektor ekonomi justru didominasi oleh kaum minoritas. Jika kekuasaan negara lemah karena prioritas kekuasaan diberikan kepada berbagai kelompok kolektif sebagai akibat dari pengakuan negara, maka negara dapat terjerumus dalam konflik-konflik internal yang berkepanjangan yang pada akhirnya akan melemahkan negara itu sendiri.

Hingga detik ini, antara pemerintah dan masyarakat Indonesia belum ada kesepakatan normatif mengenai model multikulturalisme yang harus diterapkan di negeri ini. Selain memerlukan kajian antropologis yang mendalam, diperlukan juga kajian filosofis terhadap multikulturalisme sebagai sebuah ideologi negara. Berbeda dengan yang dipahami khalayak umum, ternyata multikulturalisme menyimpan asumsi-asumsi problematis yang perlu dikenali, diakui serta diperbaiki sesuai kenyataan yang menjadi khas setiap negeri, sebelum masyarakat dan pemerintah dapat menyepakati apakah akan mengadopsi ideologi multikulturalisme dan mengimplementasikannya secara normatif.

Multikulturalisme dalam Tinjauan Sejarah

Multikulturalisme merupakan suatu kata yang sering digunakan sebagai penekanan akan pentingnya pandangan seorang manusia mengenai keragaman maupun kebijakan kebudayaan terhadap perbedaan budaya, agama, bahasa, dan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat. Konsep ini menekankan mengenai pandangan yang mengakui dan menerima realitas keberagaman budaya (multikultural), sistem, nilai, budaya atau kebiasaan, ataupun politik yang ada dalam suatu masyarakat (M. Atho

Mudzhar, 2005: 174).

Sejarah adanya multikulturalisme berkaitan erat dengan masyarakat yang majemuk di berbagai negara, termasuk Kanada, Australia, serta Amerika Serikat. Ketiganya aktif mengembangkan konsep dan teori multikulturalisme sebagai respons terhadap keberagaman budaya. Karena ketiga negara tersebut berisi masyarakat imigran dan memungkinkan juga bagi imigran-imigran lainnya bisa bergabung dan membaaur ke dalamnya. Ketiga negara itu merupakan contoh dari negara yang telah berhasil membangun masyarakat yang multikultural serta identitas negaranya, meskipun dengan cara menghapus ataupun menggunakan identitas dari kultur nenek moyang sebelumnya.

Pada sejarah awal multikulturalisme, yaitu dengan menggunakan sebuah teori yang bernama teori *melting pot* yang dikemukakan oleh J. Hector St. John de Crèvecoeur, seorang imigran yang berasal dari negara Normandia. Dalam teorinya, ia mengusulkan konsep penyatuan budaya di Amerika Serikat di mana budaya asli imigran akan meleleh menjadi sebuah budaya yang baru, yaitu budaya Amerika. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam implementasinya, ada kecenderungan budaya *White Anglo Saxon Protestant* yang biasa disingkat dengan *WASP* yang didominasi oleh imigran yang berkulit putih dari benua Eropa.

Setelah itu, ketika semakin beragamnya etnik-etnik dan kebudayaan di Amerika, maka kemudian teori *melting pot* ditanggapi dan dikritik oleh Horace Kallen, yang selanjutnya memunculkan teori baru yaitu biasa disebut dengan teori *salad bowl*. Jika teori *melting pot* yang menghilangkan budaya awal ketika mengembangkan sebuah budaya baru, namun pada teori *salad bowl* atau pada bahasa Indonesianya disebut dengan teori *gado-gado* ini sama sekali tidak menghapus budaya/kultur awal, tetapi kultur yang lain yang berada di luar *White Anglo Saxon Protestant* dibantu dengan cara yang baik dan juga dianggap memiliki kontribusi-kontribusi yang berharga dengan tujuan sebagai pengembangan budaya di Amerika, yang merupakan budaya nasional.

Amerika berusaha untuk menguatkan negara/bangsanya dengan cara membangun negara dengan kesatuan, persatuan, serta kebangsaan masyarakatnya sebagai salah satu orang yang menjadi bagian dari Amerika. Tetapi pada dekade 1960-an, sejumlah kelompok di Amerika Serikat, seperti orang Amerika dengan kulit hitam, imigran di Amerika Latin, dan etnis-etnis minoritas yang lain, mereka merasa bahwa hak-hak sipilnya belum terpenuhi sepenuhnya. Mereka menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan keadilan. Dalam usaha untuk mengatasi ketidakadilan ini, gerakan hak-hak sipil muncul, memperjuangkan kesetaraan hak-hak untuk semua warga negara Amerika. Gerakan ini melibatkan protes, perjuangan hukum, dan upaya sosial yang kuat. Oleh karena adanya hal tersebut, maka mereka membangun multikulturalisme, untuk menekankan adanya penghormatan maupun penghargaan kepada hak-hak minoritas disana. Tidak membeda-bedakan lagi antara agama, ras, etnik, ataupun warna kulit (M. Atho Mudzhar, 2005: 180-183).

Sementara itu, adapun faktor bisa mempengaruhi terbentuknya multikulturalisme di seluruh Indonesia yaitu keadaan dari budaya masyarakat atau sosiokultural, dan bermacam-macam serta luasnya geografis, memainkan peran penting dalam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan adanya beribu-ribu kepulauan dalam jarak cukup jauh antara satu pulau dengan pulau lainnya

berkontribusi pada perkembangan berbagai masyarakat dan kebudayaan yang unik di setiap daerah. Setiap pulau dan wilayah di Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, seni, musik, tarian, dan makanan khas. Maka, keadaan ini memiliki dampak menjadi negara yang kebudayaannya sangat beragam.

Dalam konsep multikulturalisme Indonesia, terdapat upaya untuk membangun masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu "berbeda-beda tetapi tetap satu". Prinsip tersebut menekankan pentingnya persatuan serta kesatuan dalam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan budaya yang nasionalisme agar menjadi persatuan dalam negara Indonesia. Meskipun demikian, dalam pengaktualannya, masih ada halangan-halangan yang menjadi gangguan dalam terciptanya multikulturalisme inklusif dan berkeadilan pada warga Indonesia.

Maka, keberagaman kultural di Indonesia memberikan tempat bagi "yang lain". Yang dimaksud dari kalimat "yang lain", adalah tanpa reduksi maupun distorsi, dengan harus menunjukkan dalam solidaritas dan keutuhan masing-masing. Identitas merupakan fakta eksoris yang mustahil untuk dikategorikan secara umum atau disederhanakan. Perbedaan diterima sebagai cara untuk menjalin hubungan, bukan sebagai ancaman yang merusak atau menjadi alasan untuk melakukan penindasan. (Susi Fitri, 2005: th).

Narasi Islamisme: dari Wacana Hingga Gerakan

Narasi merupakan salah satu bentuk pengembangan paragraf dalam suatu tulisan yang memaparkan rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dengan menguraikan urutan awal, tengah, dan akhirnya. Narasi adalah jenis penulisan yang menggambarkan perkembangan sesuatu berdasarkan urutan kronologis dari waktu ke waktu. Fokus narasi adalah pada urutan peristiwa, kejadian, dan masalah yang dihadapi. Dalam narasi, kronologi peristiwa menjadi fokus utama, termasuk urutan tahapan yang terkait dengan waktu (Mahmudi, 2013: 182).

Narasi merupakan jenis komunikasi yang berupaya mengilustrasikan peristiwa yang sudah terjadi dengan kejelasan kepada para pembaca. Ciri-ciri karangan narasi yang umumnya diakui yaitu sebagai berikut: (a) memfokuskan pada aktivitas atau aksi yang terjadi, (b) disusun dalam urutan kronologis, (c) bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi, (d) menyajikan elemen konflik.

Dilihat dari tujuan atau sasarannya, narasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris merujuk pada jenis narasi yang memiliki niat untuk memberikan informasi kepada para pembaca. Narasi ekspositoris seringkali digunakan dalam teks-teks nonfiksi, seperti artikel, laporan, atau buku pelajaran, yang tujuannya adalah menyampaikan informasi dengan jelas dan faktual. Sedangkan narasi sugestif adalah jenis narasi dengan penyusunan dan penyajian teks dengan tujuan membangkitkan daya khayal atau imajinasi bagi pembaca. Narasi sugestif sering digunakan dalam karya sastra, cerita fiksi, atau karya-karya yang lebih bersifat kreatif. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman estetik atau emosional bagi pembaca dengan menggunakan bahasa yang kaya, deskripsi yang detail, dan imajinasi yang kuat. Narasi sugestif sering kali mengandung unsur-unsur simbolik, metaforis, atau alegoris. (Mahmudi, 2013: 182-183).

Di masa lalu, ketika jumlah penduduk pada saat itu belum terlalu banyak dan

kepemilikan lahan masih meluas, kegiatan sehari-hari warganya cenderung santai setelah menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Para istri seringkali berkumpul di rumah tetangga untuk berbincang-bincang, menggosip, dan mencari kesenangan sederhana seperti mencari kutu. Namun, perubahan mulai terjadi setelah tahun 1970-an, ketika populasi penduduk mulai meningkat secara signifikan. Perubahan gaya hidup yang lebih besar terjadi ketika media sosial, seperti media sosial Facebook, yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg di tahun 2004. Di Indonesia, penggunaan media sosial, terutama Facebook, mendapatkan popularitas yang meningkat dan terus berkembang dari tahun 2008 hingga saat ini. Penggunaan media sosial telah menjadi fenomena yang menyebar seperti virus di negara ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan peringkat kelima tertinggi dalam penggunaan media sosial, dengan lebih dari 60 juta penduduknya memiliki perangkat gadget. Pada tahun 2016, menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), terdapat sekitar 132,7 juta individu yang menggunakan internet. (Puspita, 2017: 40-41).

Kemudian, platform media sosial dan media massa sering digunakan untuk menyebarkan narasi-narasi politik dan lainnya. Fenomena seperti Aksi Damai 411 dan 212 merupakan contoh-contoh yang memperoleh popularitas yang besar melalui penggunaan media sosial dan media massa. Media daring telah menjadi salah satu platform yang dimanfaatkan untuk melaksanakan proses radikalasi (Fikri, 2013: 265).

Interaksi antara Islam dan modernitas yang terkait dengan budaya Barat telah menimbulkan berbagai respons yang berbeda dalam kalangan umat Islam. Tiga tanggapan yang sering ditemui adalah gerakan reformis, sekularisasi, dan gerakan Islamis. Kelompok reformis berpendapat bahwa Umat Islam memiliki potensi untuk mengadopsi beberapa konsep positif dari pemikiran dan pencapaian Barat demi kemajuan agama Islam.

Kelompok yang menganut paham sekularisme memandang bahwa pemisahan antara agama dan politik, seperti yang telah berhasil diraih oleh Barat melalui penerapan prinsip-prinsip sekularisme, adalah pendekatan yang paling optimal dan dapat diikuti oleh umat Islam. Kelompok Islamis berpendapat bahwa agama Islam bukan hanya agama, tetapi juga merupakan sistem yang komprehensif dan definitif yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk politik dan hukum. Mereka mengadvokasi penerapan syariah Islam sebagai dasar negara dan mengkritik pengaruh dan nilai-nilai Barat yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bagi Islamis, keberhasilan umat Islam terletak pada pemahaman dan implementasi penuh ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. (al-Din wa al-Daulah).

Walaupun terdapat beberapa ahli yang mengamati dan berpendapat bahwa terdapat doktrin tekstual dalam Islam yang dapat mempengaruhi pandangan pengikutnya agar terlibat dalam gerakan Islamis, tidak gampang untuk menampik fakta bahwa ide tersebut disampaikan pada sekularisme politik. Setelahnya, akan menunjukkan bahwa isu-isu terkait Islamisme merupakan masalah yang relevan dengan zaman sekarang. Maksudnya, konsep fundamental Islamisme itu bukanlah sebuah upaya yang bertujuan untuk kembali mewujudkan mimpi dari Abad Pertengahan pada Abad yang Modern, tetapi merupakan bagian dari kontradiksi yang timbul dari janji kemodernan itu sendiri (Mudzakir, 2016: 37-38).

Voltaire, seorang filsuf terkenal dari Prancis, pertama kali mengemukakan istilah "Islamisme" pada abad ke-18. Istilah ini digunakan sebagai pengganti kata

"mahometisme" yang digunakan oleh orang Eropa pada saat itu untuk merujuk pada "agama orang Arab". Istilah "Islamisme" kemudian pada edisi 1900 dari Oxford English Dictionary, istilah tersebut diadopsi ke dalam bahasa Inggris. Pada beberapa dekade berikutnya, istilah "Islamisme" jarang digunakan. Namun, akhir-akhir ini, terutama setelah perang dingin dan dengan munculnya isu-isu terkait Islam politik dalam politik internasional, istilah ini kembali digunakan secara meluas oleh para akademisi dan jurnalis. Dan pada saat ini, istilah "Islamisme" secara umum merujuk pada variasi penafsiran agama, struktur organisasi, dan gerakan yang ada di antara umat Islam, yang menekankan keistimewaan dan keunggulan Islam dalam konteks politik. Istilah "Islamisme" ini sangat sering disamakan dengan istilah "salafisme" dan "fundamentalisme", meskipun ada perbedaan dalam pengertian dan nuansa antara ketiga istilah tersebut (Mudzakir, 2016: 38).

Pers Barat sering kali memperbesar fenomena radikalisme yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam. Dalam beberapa kasus, media Barat memang telah memperoleh perhatian yang signifikan dalam melaporkan isu-isu terkait dengan radikalisme atau terorisme yang terkait dengan kelompok-kelompok ekstremis yang mengklaim agama Islam. Yang hal tersebut mengakibatkan umat Islam terpojokkan karena mendapatkan tuduhan dengan hal-hal yang negatif. Hal itu terjadi karena orang-orang Barat memiliki kemampuan untuk menguasai media massa sebagai instrumen yang kuat untuk memproyeksikan dan memengaruhi kebudayaan dominan dari peradaban global. Akibatnya, yang menjadi pemahaman masyarakat dunia adalah apa yang telah didefinisikan oleh media-media dari negara di Barat (Ummah, 2012: 115).

Bagi Pers Barat, menggunakan label Islam sebagai penyebutkan untuk negara fundamentalis terasa sangat menyenangkan, daripada label militan hindu di India, label Tamil di Srilangka, dan yang lainnya (Ummah, 2012: 115-116). Contoh yang terjadi yaitu diamnya para pemimpin politik Barat ataupun tindakan kepalsuan mereka ketika mengetahui kekerasan yang telah terjadi dan dilakukan oleh kelompok ekstremis Yahudi atau pasukan Israel terhadap masyarakat Arab Palestina.. Karena yang mereka lakukan kepada masyarakat Arab Palestina tersebut serupa dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. ekstremis "ekstremisme dalam Islam". Namun, julukan "ekstremisme dalam Islam" ini lebih berkaitan dengan pergerakan Islam.

Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia

Di Indonesia, memiliki keragaman dalam hal jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, budaya, struktur sosial, nilai-nilai, dan tradisi di kalangan masyarakat. Keragaman ini adalah sebuah kekayaan yang dapat dijadikan sumber inspirasi dan bahan yang digunakan untuk memenuhi beragam kebutuhan dan tujuan. Namun, Sebagian orang tidak menyadari pentingnya keragaman ini, sehingga cenderung memiliki sikap individualistik dan kurang peduli terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa kesejahteraan individu dipengaruhi oleh kelangsungan dan keteraturan masyarakat. Masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada prosesnya terjadi dengan cara yang dinamis, sesuai situasi, kondisi, serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Penting diingat bahwa pendidikan dan interaksi sosial merupakan media yang memainkan peran penting dalam alih budaya.

Ahli sosiologi pendidikan menyatakan bahwa ada hubungan saling-menyaling antara dunia pendidikan dan situasi sosial dalam masyarakat. Hubungan tersebut menunjukkan yaitu tentang yang terjadi di lingkup pendidikan mencerminkan keadaan yang ada pada kehidupan di masyarakat. Namun, hubungan ini tidak selalu sejalan dan kadang-kadang mengalami kesenjangan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan pada lingkup pendidikan dan situasi sosial dalam masyarakat. Salah satu faktor tersebut adalah kesenjangan ekonomi, di mana ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan sumber daya pendidikan dapat mempengaruhi kesetaraan dalam masyarakat. Kesenjangan politik, perseteruan politik, dan persaingan kekuasaan juga dapat memengaruhi arah dan prioritas dalam sistem pendidikan. Selain itu, persaingan dan konflik antaragama juga dapat memengaruhi hubungan antara pendidikan dan kondisi sosial masyarakat. Banyak dari konflik yang berhubungan dengan agama, dinilai sebagai salah satu faktor pemicu (Naim, 2010: 14).

Narasi Islamisme yang sedang beredar di masyarakat saat ini. Narasi Islamisme tersebut merujuk pada pandangan atau keyakinan yang tidak mampu memahami keragaman dengan benar. Tujuan dari narasi ini adalah untuk menghasilkan usaha atau tindakan dari sebagian kelompok yang ingin mewujudkan imajinasinya menjadi kenyataan. Kelompok ini sering menargetkan remaja atau pemuda dengan iming-iming imbalan dan sejenisnya. Untuk menangani narasi Islamisme dan tantangan yang terkait, dunia pendidikan memainkan peran yang sangat penting. Pendidikan multikultural dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam hal ini. Pendidikan multikultural mencakup konsep-konsep seperti demokrasi, persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

Pendidikan multikultural pada konsep demokrasi ini berbeda dengan demokrasi yang memiliki ciri sekular, liberal, dan berpusat pada manusia seperti yang ada di negara-negara Barat. Namun, demokrasi yang diharapkan yaitu paduan demokrasi dari kepentingan individu dan sosial, serta nilai-nilai Tuhan dan nilai-nilai manusia, yang dalam konteks ini disebut sebagai syura dalam Islam, tidak seperti kekerasan demokrasi yang berkebebasan di dunia Barat. Hal ini bermaksud, agar pada segala jenis kelompok dan segala macam tujuan, dapat dimusyawarahkan agar dapat dirumuskannya suatu perkara. Dengan adanya musyawarah, pertentangan dalam suatu kelompok dengan kelompok-kelompok lain tidak akan pernah terjadi lagi. Karena akan menimbulkan Cerita-cerita yang saling menjatuhkan bagi kelompok lain..

Pada pendidikan yang menganut nilai-nilai multikultural ini, konsep persamaannya tidak seperti persamaan dalam dunia Barat yang hanya mengakui persamaan yang mereka anggap sama. Namun, persamaan yang dimaksud yaitu semua individu harus mendapatkan perlakuan yang sama, dan tidak ada yang membedakan mengenai Posisi, status sosial, kekayaan, dan hal-hal yang sifatnya lainnya. Tetapi, hal-hal yang bersifat kualitatif seperti moral, spiritual, keimanan, ketaqwaan, dan semacamnya. Sehingga, muncul Konsep yang mendorong penghilangan hukum dan hak-hak istimewa yang tidak sah. Maka, dalam konteks ini kesetaraan hak dan peluang pada pendidikan adalah sebuah prioritas yang utama, karena melalui pendidikan terbuka peluang untuk menciptakan pergerakan sosial. Yang hal tersebut karena disebabkan semakin tingginya pendidikan, maka hampir dapat dipastikan bisa meningkatkan reputasi, kemampuan, dan kesempatan maupun kekayaan besar.

Pengertian kebebasan, yaitu bagi masyarakat Barat merupakan dengan cara memberikan semua hal yang diharapkan oleh individu, yang selanjutnya bisa mencapai

tujuan pada hidup, misalnya seperti kesenangan/kebahagiaan. Namun, bukanlah kebebasan yang seperti itu yang terdapat pada pendidikan dengan nilai-nilai multikultural. Tetapi, suatu bentuk kebebasan yang berakar pada tanggung jawab, diwarnai oleh penghormatan terhadap kebebasan orang lain, dan terbatas oleh hukum, adat istiadat, moral, serta kesepakatan bersama.

Pluralisme ataupun keragaman adalah pandangan yang menghargai dan menghormati perbedaan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Pendekatan ini mendasarkan pada sikap saling menghargai, memanfaatkan keragaman secara produktif demi kepentingan bersama, saling memberikan dan meminta dukungan, saling mendukung dan memperkuat, serta berbagi pengalaman kehidupan masing-masing, menghindari gangguan serta campur tangan dalam urusan individu, serta terus menemukan kesepakatan atau titik tengah demi kesejahteraan bersama..

C. KESIMPULAN

Dari semua penjelasan di atas, menjelaskan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu hal yang begitu penting untuk diimplementasikan pada pendidikan Indonesia. Karena, dengan adanya pendidikan multikultural ini bisa difungsikan untuk sarana pengganti yang dapat memecahkan masalah. Dalam al-qur'an, manusia ditulis dengan beragam kata. Pada salah satunya yaitu "alnas", yang maksudnya dari perspektif sosiologis, manusia terdiri dari beragam aspek seperti jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, budaya, struktur sosial, nilai-nilai, tradisi, dan berbagai elemen keberagaman lainnya. Dengan sebaik-baiknya, manusia harus menggunakan adanya keberagaman ini untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tulisan ini ditujukan untuk mengatasi dari narasi islamisme dengan mengimplementasikannya dalam pendidikan multikultural pada macam-macam jenjang pendidikan di Indonesia. Yang artinya, berarti proses pembangunan semua Potensi manusia yang menghormati keberagaman dan perbedaannya dalam hal budaya, etnis, suku, dan aliran keagamaan harus diperkuat. Maka, Pendidikan multikultural mengutamakan penghargaan dan rasa hormat yang tinggi terhadap martabat manusia. Terdapat empat pilar penting dalam pendidikan multikulturalisme, yakni pendekatan demokratis, kesetaraan, kebebasan, dan pemahaman akan pluralitas, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari ekstremisme seperti Islamisme. Dengan pendekatan pendidikan multikulturalisme yang kokoh, diharapkan generasi mendatang akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, kebebasan, dan pluralisme. Dengan begitu, narasi ekstremisme seperti Islamisme dapat dicegah dan digantikan dengan dialog, kerjasama, dan pemahaman yang lebih mendalam antara berbagai kelompok masyarakat.

REFERENCES

- Azra, Azyumardi. 2007. —Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia. | <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20azyumardi%20azra.htm>.
Brookings Institution Press.
- Fikri, Zainal. “Narasi Dediradikalisasi di Media Online Republika dan Ar Rahmah”,
Jurnal Lektur Keagamaan. Vol. 11 No. 2 (2013).
- Fitri, Susi. “Multikulturalisme”. dalam <http://susvie.wordpress.com/2008/08/11/multikulturalisme/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2010.
- Heywood, Andrew. 2007. Political Ideologies (4th Edition). Palgrave: McMillan.
- Ichtiyanto. 2005. Masyarakat Majemuk dan Kerukunan Hidup Beragama dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI.
- Maarif, Ahmad Syafii. “Setelah "Bela Islam", Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial,” Jurnal Maarif. Vol. 11 No. 2 (Desember 2016).
- Mahmudi., Zulaeha, Ida., dan Supriyanto, Teguh. “Menulis Narasi dengan Metode Karyawisata dan Pengamatan Objek Langsung Serta Gaya Belajarnya,” Jurnal Journal of Primary Education. Vol. 2 (Januari 2013).
- Mudzakkir, Amin. “Islam dan Politik di Era Kontemporer,” Jurnal Epistemé. Vol. 11, No. 1, (Juni 2016).
- Mudzar, M. Atho. 2005. Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI. Konsep Multikulturalisme.
- Naim, Ngainun., & Sauqi, Achmad. Pendidikan Multikultural; Konsep dan Aplikasi. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media Group, 2010.
- Nasikun. 1989. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Noris, Pippa. (2000). Global Governance and Cosmopolitan Citizens, dalam Joseph S. Nye and John D. Donahue, Governance in a Globalizing World, Washington:
- Parekh, Bikhu. 2001. Rethinking Multiculturalism. Harvard.
- Puspita, Hari. “Tradisi Petan dan Medsos,” Majalah Al-Fikr. (Mei-Oktober 2017).
- Ummah, Sun Choirol. “Akar Radikalisme Islam di Indonesia,” Jurnal Humanika. No.12 (September 2012).